

**Bidang Unggulan: Ilmu Non Kependidikan
Kode>Nama Rumpun Ilmu: 619 / Ilmu Sosial**

**LAPORAN TAHUNAN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**MODEL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KORUPSI
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

TIM PENGUSUL:

Anang Priyanto, S.H., M.Hum. NIDN 0010095815

M. Lies Endarwati, M.Si. NIDN 0011076105

Dr, Samsuri, M.Ag. NIDN 0019067206

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
November 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : MODEL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KORUPSI DI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Anang Priyanto, SH. M.Hum
NIDN : 0010095815
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : PKn
Nomor HP : 081227201860
Alamat surel (e-mail) : anang_priyanto@uny.ac.id
Anggota (1)
Nama Lengkap : M. Lies Indarwati, M.Si
NIDN : 0011076105
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
Anggota (2)
Nama Lengkap : Dr. Samsuri, M.Ag.
NIDN : 0019067206
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp.50.000.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp.100.000.000,-

Yogyakarta, 30 Nopember 2013

Ketua,

Anang Priyanto, M.Hum
NIP.19580910 198503 1 003

Mengetahui,
Dekan FIS UNY

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP.19620321 198903 1 001

Menyetujui,
Ketua LPPM UNY

Prof. Dr. Anik Gufron
NIP.19621111 198803 1 001

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah swt atas karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan judul MODEL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KOUPSI DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA dengan baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan penelitian ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sudah sepantasnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan penelitian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.M.A selaku Rektor UNY yang telah mengizinkan kami melakukan penelitian di UNY;
2. Prof. Dr Anik Gufron, selaku Ketua LPPM UNY yang telah menyetujui bantuan dana penelitian kami;
3. Drs. Budi Takarina, M.Pd. selaku Kepala Biro UPK UNY yang telah membantu dalam mengumpulkan data penelitian di UNY;
4. Prof. Dr. Ajat Sudrjat M.Ag. selaku Dekan FIS yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian, dan
5. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberi bantuan kepada kami dalam melakukan penelitian hingga tersusunnya laporan penelitian ini.

Semoga amal baik Bapak/Ibu mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Peneliti juga menyadari bahwa laporan penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca selalu kami nantikan demi perbaikan laporan penelitian ini. Meskipun banyak kelemahan disana-sini tetapi kami berharap laporan penelitian ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, Nopember 2013

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	1
BAB 1 PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kebijakan	5
B. Model Kebijakan	5
C. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Negeri Yogyakarta	7
D. Korupsi dan Penanggulangannya	8
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
A. Tujuan Penelitian	10
B. Manfaat Penelitian	10
BAB 4 METODE PENELITIAN	11
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
B. Populasi dan Sampel	11
C. Lokasi Penelitian	11
D. Teknik Pengumpulan Data	11
E. Validasi Instrumen	11
F. Analisis Data	12
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	13
A. Hasil Penelitian	13

B. Pembahasan	18
1. Kebijakan Penanggulangan Korupsi di UNY	18
2. Model Kebijakan Penanggulangan Korupsi yang diinginkan di UNY	19
BAB 6 RENCANA DAN TAHAPAN BERIKUTNYA	24
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	25
A. Kesimpulan	25
B. Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Universitas Negeri Yogyakarta dalam menanggulangi korupsi dan menemukan model kebijakan yang diinginkan Universitas Negeri Yogyakarta dalam menanggulangi korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sampel penelitian ditentukan secara *multystage sampling*, yakni dengan menentukan sampel berkelompok (*stratified sample*) dan setiap kelompok ditentukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket, dokumen dan diperkuat dengan pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion* (FGD), dan validasi instrumen dilakukan melalui validitas isi (*content validity*) dengan teknik analisis data menggunakan statistik dekriptif ditambah penjelasan kualitatif untuk mempertajam hasil analisis kuantitatif yang diuraikan dalam bentuk deskriptif uraian kalimat penjelasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan korupsi di UNY tidak ada secara khusus dikeluarkan. Kebijakan yang ada mengikuti dan mempertahankan kebijakan yang sudah ada yang kedudukannya lebih tinggi, yaitu dari Pemerintah. Model kebijakan penanggungan korupsi di UNY yang diinginkan untuk digunakan adalah Model Rasional, terbukti dari hasil analisis data:

- Kebijakan penanggulangan korupsi yang dikeluarkan isinya diinginkan merupakan aspirasi semua staf yang ada di unit kerja;
- Kebijakan penanggulangan korupsi yang dikeluarkan harus menekankan pada aspek efesiensi atas beban kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
- Kebijakan penanggulangan korupsi sebaiknya dibuat sebagai turunan dari kebijakan yang sudah ada yang berasal dari Pemerintah pusat.
- Kebijakan penanggulangan korupsi sebagai pedoman bagi semua pegawai untuk melaksanakan tugas masing-masing.
- Kebijakan penanggulangan korupsi sebaiknya dijabarkan dan dibuat oleh pemimpin tertinggi yaitu rektor.

Didukung dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja memperkuat bahwa model kebijakan penanggulangan korupsi yang diinginkan adalah model rasional.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara yang akhir-akhir ini telah mewabah ke semua sendi kehidupan bangsa Indonesia. Begitu besar bahayanya korupsi ini bagi kehidupan bangsa menjadikan segala upaya dilakukan untuk memberantasnya, baik melalui pembentukan undang-undang maupun melalui upaya non undang-undang. Sejak diberlakukannya undang-undang korupsi yang telah beberapa kali mengalami penggantian yaitu Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan korupsi dari tahun ke tahun masih saja bermunculan bahkan pada akhir-akhir ini semakin marak bermunculan dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, seperti kasus korupsi Gayus Tambunan, kasus korupsi Nazarudin, kasus korupsi Hambalang, kasus korupsi Angelina Sondah, kasus korupsi Joko Susilo.

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di masyarakat seolah-olah menjadikan korupsi sebagai suatu kebiasaan. Adanya kebiasaan korupsi inilah menjadikan pemberantasan korupsi di Indonesia sulit dilakukan. Pemberantasan korupsi akan efektif bila dilakukan dengan cara mengubah kebiasaan masyarakat sejak dini dan menanamkan paradigma bahwa korupsi sebagai suatu perbuatan yang salah. Cara mengubah kebiasaan masyarakat inilah yang dapat pula disebut sebagai upaya pemberantasan korupsi di luar peraturan perundang-undangan.

Pemberantasan korupsi di luar peraturan perundang-undangan lebih bersifat preventif guna membentuk sikap dan perilaku anti korupsi. Pembentukan sikap dan perilaku anti korupsi harus ditanamkan sejak dini kepada setiap anak bangsa ini agar terbentuk watak dan karakter bangsa yang anti korupsi. Gerakan anti korupsi harus menjadi suatu kebijakan Pemerintah agar dapat menjadi sebuah gerakan yang wajib dan dilaksanakan oleh semua

pihak, baik oleh Pemerintah itu sendiri maupun semua kalangan warga masyarakat. Meski telah banyak peraturan perundang-undangan anti korupsi dibentuk, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui penanganan diluar peraturan perundang-undangan dapat dilakukan oleh pihak siapapun, baik perorangan maupun kelompok, baik lembaga swasta maupun lembaga milik pemerintah dan tidak terkecuali Universitas Negeri Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan milik Pemerintah.

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai lembaga pendidikan tinggi milik Pemerintah yang mempunyai visi, misi dan tujuan menghasilkan manusia yang memiliki ketaqwaan, kemandirian dan kecendikiaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka konsekuensi lulusan yang dihasilkan haruslah benar-benar menjadi manusia yang taqwa, mandiri dan cendikia. Pembentukan manusia yang taqwa, mandiri dan cendikia harus tercermin dalam segala kegiatan akademik maupun non akademik selama belajar di UNY. Oleh karenanya keberhasilan pembentukan manusia yang taqwa, mandiri dan cendikia harus merupakan tujuan utama kebijakan pimpinan UNY. Jika benar kebijakan pembentukan watak manusia yang taqwa, mandiri dan cendikia telah dilakukan tentunya harus pula didukung kebijakan internal dalam pelayanan publik (akademik maupun non akademik) yang tidak kalah pentingnya serta harus bernar-benar bernuansa ketaqwaan, kemandirian dan kecendikiaan pula. Kebijakan yang demikian termasuk sebagai suatu kebijakan dalam upaya untuk menanggulangi korupsi di UNY, karena apabila kebijakan itu berhasil menghasilkan manusia-manusia yang memiliki ketaqwaan, kemandirian dan kecendikiaan tentunya akan memiliki watak anti perbuatan-perbuatan terlarang termasuk korupsi. Kebijakan akan berhasil dilaksanakan dengan baik bilamana kebijakan itu sesuai dengan kondisi masyarakat dimana kebijakan itu diberlakukan. Demikian pula keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan merupakan aspirasi komunitas diberlakukannya kebijakan tersebut. Dengan demikian model kebijakan penanggulangan korupsi yang dikeluarkan haruslah sesuai dengan kondisi dan aspirasi komunitas dimana kebijakan tersebut diberlakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kebijakan Universitas Negeri Yogyakarta dalam penanggulangan korupsi?

2) Model kebijakan apakah yang diinginkan di Universitas Negeri Yogyakarta dalam menanggulangi korupsi?

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan

Banyak ahli mengemukakan pengertian kebijakan dengan beragam, antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. James E Anderson mengartikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pajabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Solichin AW.1997: 2). H. Heclo menyatakan bahwa kebijakan lebih baik dipandang sebagai tindakan yang sengaja dilakukan atau tidakmauan untuk bertindak secara sengaja daripada dipandang sebagai keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan tertentu. Sedangkan David Easton menyatakan bahwa kebijakan terdiri dari serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan untuk mengalokasikan nilai-nilai. (Solichin AW. 1990: 21). Derbyshire menyatakan bahwa kebijakan (*policy*) sebagai sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial ekonomi. Lebih lanjut Derbyshire mengemukakan bahwa *policy* merupakan produk akhir setiap pemerintahan, dalam arti merupakan kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan wakil rakyat. (Samodra Wibawa. 1994: 49). Sedangkan Hofferbert sebagaimana dikutip Samodra Wibawa (1994: 50) mengemukakan bahwa ada dua cara untuk memahami suatu kebijakan, yaitu pertama, mendekati suatu policy melalui substansinya (yakni rumusan-rumusan redaksi suatu kebijakan yang berisi tujuan-tujuan/'goal' apa yang hendak dicapai), dan kedua, memahami suatu policy dari proses pelaksanaannya yang membeberkan kepada kita hasil maupun dampak kebijakan tersebut baik hasil yang bersifat sementara maupun final. Rose mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan-tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat. (Samodra Wibawa. 1994: 50).

B. Model Kebijakan

Model kebijakan merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan yang penekanannya pada sesuatu hal sehingga memunculkan beberapa model, antara lain:

1) Model Elite

Model ini menekankan pada kebijakan yang dibuat oleh para elite politik. Kebijakan publik boleh dikatakan identik dengan perspektif elite politik. Kebijakan negara mencerminkan kehendak atau nilai-nilai sekelompok kecil orang yang berkuasa. Nilai-nilai, sikap dan pandangan elite sangat mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan, namun tidaklah berarti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para elit politik selalu tidak mementingkan kesejahteraan rakyat. Jika terjadi perubahan-perubahan kebijakan biasanya sifatnya tambal sulam ataupun *trial-error* yang hanya mengubah atau memperbaiki kebijakan-kebijakan sebelumnya. Dalam kondisi tertentu para elit politik tetap membutuhkan dukungan massa, sehingga mereka juga harus memuaskan sebagian masa tersebut dan tanggungjawab untuk menyejahterakan masyarakat dianggap tetap terletak di tangan para elite politik.

2) Model Kelompok

Model ini merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan yang didalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. (Samodra Wibawa, 1994: 9). Pembuatan kebijakan sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara negosiasi, bargaining, dan kompromi. Kebijakan negara merupakan kompromi atau keseimbangan yang tercapai dalam pertarungan antarkelompok yang memperjuangkan kepentingan masing-masing pada suatu waktu. Kelompok-kelompok kepentingan memiliki akses yang relatif memadai terhadap proses pembuatan kebijakan negara.

Model kelompok dapat dipergunakan untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan maupun implementasinya. Model ini dapat digunakan untuk menelaah kelompok-kelompok apakah yang saling berkompetisi untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan negara, dan manakah yang memiliki pengaruh yang paling kuat. Pada tingkat implementasi, kompetisi antar kelompok juga merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan. (Samodra Wibawa, 1994: 10).

3) Model Rasional

Model ini berasal dari pemikiran Herbert Simon, yang menekankan bahwa inti dari perilaku administrasi adalah pada proses pengambilan keputusan secara rasional. Suatu kebijakan negara harus didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. (Samodra Wibawa, 1994: 10). Model ini lebih menekankan pada aspek

efisiensi maupun ekonomis. Rasionalitasnya terletak pada perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Semakin rendah nilai pengorbanan dan semakin tinggi tingkat pencapaiannya, maka suatu kebijakan dianggap baik. Sepanjang kebijakan yang ditempuh akan memberikan suatu hasil yang baik dengan sumberdaya yang paling sedikit, maka kebijakan tersebut layak untuk dilaksanakan.

4) Model Inkremental

Model kebijakan yang berkembang sedikit demi sedikit secara teratur. Model ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap model rasional. Kritik tersebut menyatakan bahwa para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara ajeg terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya. Para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang dipersyaratkan oleh pendekatan rasional. Pendekatan inkremental dilakukan karena alasan: (Samodra Wibawa, 1994:11).

- (a) Para pembuat kebijakan tidak memiliki waktu, intelektualitas maupun biaya yang memadai untuk penelitian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan landasan bagi perubahan tujuan kebijakan.
- (b) Adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tak diinginkan sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya.
- (c) Adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan demi suatu kepentingan.
- (d) Menghindari adanya berbagai konflik jika harus melakukan proses negosiasi yang melelahkan bagi kebijakan baru.

C. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Negeri Yogyakarta

Visi, misi dan tujuan Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 adalah:

Visi UNY: pada tahun 2025 menjadi universitas kependidikan kelas dunia berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.

Misi UNY:

- 1) menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang kependidikan yang didukung bidang nonkependidikan untuk menghasilkan manusia unggul yang mengutamakan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;
- 2) menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan,

dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga yang menyejahterakan individu dan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global;

- 3) menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- 4) menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik, bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan UNY:

- 1) terwujudnya manusia yang bertaqwa, mandiri, dan cendekia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
- 2) terwujudnya penemuan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global;
- 3) terselenggaranya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- 4) terwujudnya tata kelola universitas yang baik, bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

D. Korupsi dan Penanggulangannya

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio-Corumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Beberapa ahli mengemukakan pengertian korupsi ini dalam berbagai pendapat sesuai dengan keahliannya, namun pada intinya pendapat mereka tentang korupsi ini sama bahwa korupsi adalah perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari mereka yang mempunyai kedudukan untuk memenuhi kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum atau negara.

Masalah korupsi merupakan masalah yang sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat, dan masalah korupsi bukan semata-mata masalah hukum dan kebijakan penegakan hukum. Upaya penanggulangan korupsi melalui kebijakan peraturan

perundang-undangan telah lama dilakukan, namun tetap saja korupsi selalu ada dan sulit untuk diberantas. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (1998: 72) bahwa sulitnya untuk diberantas disebabkan karena masalah korupsi ini berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas masalah lainnya, seperti misalnya sikap mental, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum. Oleh karenanya masalah korupsi juga memerlukan penanganan melalui kebijakan non peraturan perundang-undangan untuk memberantasnya. Untuk itulah pemberantasan korupsi memerlukan kebijakan integral, disamping lewat kebijakan penegakan hukum atau yang oleh Barda Nawai Arief (1998: 72) disebut sebagai “penyembuhan simptomatik” juga harus diupayakan “penyembuhan kausatif” terhadap semua faktor peluang terjadinya korupsi.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENNELITIAN

A. Tujuan Penelitian:

- 1) Mengetahui bagaimana kebijakan Universitas Negeri Yogyakarta dalam menanggulangi korupsi;
- 2) Menemukan model kebijakan yang diinginkan Universitas Negeri Yogyakarta dalam menanggulangi korupsi;

B. Manfaat Penelitian

- 1) Sebagai bahan kajian bagi pengambil kebijakan di UNY untuk melakukan evaluasi atas pentingnya selalu berupaya untuk tetap menanamkan sikap dan perilaku anti korupsi kepada civitas akademika dan karyawan UNY,
- 2) Sebagai upaya untuk mengantisipasi korupsi melalui pembentukan sikap perilaku yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan UNY sebagai lembaga penghasil calon guru.
- 3) Sebagai bahan kajian pembentukan karakter bangsa yang memiliki sikap perilaku anti korupsi.
- 4) Sebagai bahan acuan penggunaan model kebijakan penanggulangan korupsi yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan UNY.

BAB 4

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan semua informasi atau data yang diwujudkan dalam bentuk angka dan dianalisis berdasarkan angka dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Disamping itu juga dilakukan dengan pendekatan kualitatif sebagai rancangan bantu agar penelitian dapat mendeskripsikan obyek secara lengkap dan mendalam.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah civitas akademika dan karyawan Universitas Negeri Yogyakarta dengan sampel penelitian ditentukan secara *multystage sampling*, yakni dengan menentukan sampel berkelompok (*stratified sample*) dan setiap kelompok ditentukan secara *purposive sampling* terlebih dahulu, dengan kriteria atau pertimbangan:

- (1) Dosen dan karyawan sebagai pejabat pengambil keputusan di setiap unit utama UNY.
- (2) Mahasiswa yang aktif di organisasi kemahasiswaan.

Kemudian dilakukan *snowball* dengan *keyinforman* Kepala Biro, Ketua Lembaga atau Dekan. Penentuan sampel secara *multystage sampling* ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat ditemukan kebijakan yang digunakan dalam penanggulangan korupsi di UNY dan model kebijakan yang sesuai dalam penanggulangan korupsi di UNY.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kampus Universitas Negeri Yogyakarta, baik Kampus Karangmalang, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan angket, dokumen dan diperkuat dengan pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

E. Validitas Instrumen

Validitas instrument (angket) dilakukan melalui validitas isi (*content validity*) yaitu angket didiskusikan bersama seluruh anggota tim peneliti dan dikonsultasikan kepada ahli.

F. Analisis Data

Data kuantitatif akan dianalisis dengan teknik statistik deskriptif untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan gambaran umum kebijakan UNY dalam penanggulangan korupsi, dan ditambah penjelasan kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan FGD untuk mempertajam hasil analisis kuantitatif yang akan diuraikan dalam bentuk deskriptif uraian kalimat penjelasan.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada setiap unit, fakultas dan lembaga Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dengan responden para kepala bagian dan kepala sub bagian, para ketua jurusan dan mahasiswa pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang dalam kegiatannya menggunakan anggaran dari UNY. Jumlah kepala bagian 16 orang, kepala sub bagian 51 orang. Jumlah pengurus UKM 17 orang dan BEM 11 orang. Sedangkan para ketua jurusan 12 orang. Jumlah keseluruhan responden 95 orang.

Data penelitian ini diperoleh dari dokumen dan angket (quesioner) yang diberikan kepada responden berupa angket gabungan terbuka dan tertutup untuk menjangkau data tentang kondisi nyata kebijakan penanggulangan korupsi di UNY, serta data yang diperoleh dari *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengungkap pelaksanaan kebijakan penanggulangan korupsi di UNY dan kebijakan penanggulangan korupsi yang diharapkan atau diinginkan untuk diberlakukan di UNY.

Hasil yang diperoleh dari angket penelitian sebagai berikut:

Tabel 1: Kondisi responden terhadap unit kerja

No.	Kondisi/keadaan nyata	%
1.	Merasa unit kerja sebagai unit yang sangat penting	45,26
2.	Merasa unit kerja sebagai unit yang tidak penting	54,74
	Total	100,00

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (54,74%) merasa bahwa unit kerja tempat responden bekerja tidak penting sebagai bagian dari UNY secara keseluruhan.

Tabel 2: Pengetahuan tentang korupsi

No.	Kondisi/keadaan nyata	%
1.	Merasa tahu kriteria perbuatan korupsi	98,92
2.	Tidak tahu kriteria korupsi	1,08
	Total	100,00

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (98,92%) merasa tahu kriteria korupsi.

Tabel 3: Pengetahuan Penggolongan Korupsi

No.	Kondisi/keadaan nyata	%
1.	Tidak tahu penggolongan perbuatan korupsi	90,53
2.	Tahu penggolongan perbuatan korupsi	9,47
	Total	100,00

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (90,53%) tidak tahu penggolongan perbuatan korupsi.

Tabel 4: Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Unit Kerja

No.	Kondisi/keadaan nyata	%
1.	Unit kerja ada kebijakan penanggulangan korupsi	42,10
2.	Unit kerja tidak ada kebijakan penanggulangan korupsi	57,90
	Total	100,00

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (57,90%) menyatakan bahwa pada unit kerjanya tidak ada kebijakan penanggulangan korupsi.

Tabel 5: Keinginan Unit Kerja ada Kebijakan Penanggulangan Korupsi

No.	Kondisi/keadaan nyata	%
1.	Kebijakan penanggulangan berupa peraturan, keputusan, surat edaran	28,42
2.	Kebijakan dikeluarkan oleh Rektor	2
3.	Unit kerja tidak ada kebijakan penanggulangan korupsi, tetapi diserahkan kepada staff masing-masing	36,84
4.	Tidak tahu	32,74
	Total	100,00

Dari tabel 5 diketahui bahwa sebagian besar responden (36,84%) menyatakan bahwa di unit kerjanya tidak ada kebijakan penanggulangan korupsi tetapi diserahkan sepenuhnya kepada staf masing-masing untuk bertanggungjawab atas tugas dan pekerjaannya. Sebagian kecil responden (2%) berkeinginan jika kebijakan penanggulangan korupsi dikeluarkan oleh Rektor, dan sebagian responden (28,42%) kebijakan penanggulangan korupsi itu berupa peraturan, keputusan, surat edaran.

Tabel 6: Alasan Mengapa Unit Kerja Tidak Ada Kebijakan Penanggulangan Korupsi

No.	Kondisi/keadaan nyata	%
1.	Tidak tahu kenapa unit kerja tidak ada kebijakan penanggulangan korupsi	30,53
2.	Pimpinan tidak berminat membuat kebijakan penanggulangan korupsi.	3,16
3.	Pimpinan tidak tahu membuat kebijakan penanggulangan korupsi	3,16
4.	Pimpinan banyak disibukkan oleh pekerjaannya	7,37
5.	Tidak menjawab	55,78
	Total	100,00

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa sebagian responden (30,53%) tidak tahu alasan mengapa unit kerjanya tidak ada kebijakan penanggulangan korupsi, dan sebagian besar responden (55,78%) tidak menjawab alasan mengapa unit kerjanya tidak ada kebijakan penanggulangan korupsi. Sebagian kecil responden (3,16%) menyatakan bahwa pada unit kerjanya tidak ada kebijakan penanggulangan korupsi dengan alasan pimpinan tidak berminat dan tidak tahu bagaimana membuat kebijakan penanggulangan korupsi.

Tabel 7: Keinginan Inisiatif Isi Kebijakan

No.	Kondisi/keadaan nyata	%
1.	Isi kebijakan penanggulangan korupsi di unit kerja	
	a. Inisiatif pimpinan	13,70
	b. Aspirasi kelompok bagian tertentu dari unit kerja	2,10
	c. Aspirasi semua staf yang ada di unit kerja	11,58
	d. Aspek efisiensi beban kerja pada unit kerja	13,68
	e. Kebijakan yang sudah ada dengan tidak melakukan perubahan	24,21
2.	Tidak tahu	34,73
	Total	100,00

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (34,73%) tidak tahu atau tidak menjawab keinginan inisiatif isi kebijakan penanggulangan korupsi untuk unit kerjanya. Sebagian responden (24,21%) menginginkan inisiatif isi kebijakan penanggulangan korupsi dikembalikan kepada kebijakan yang sudah ada dengan tidak melakukan perubahan. Sebagian kecil responden (2,10%) menginginkan isi kebijakan penanggulangan korupsi merupakan aspirasi kelompok bagian tertentu yang ada di unit kerja masing-masing.

Tabel 8: Perlunya Penerapan Kebijakan Penanggulangan Korupsi

No.	Kondisi/keadaan nyata	%
1.	Diterapkannya kebijakan penanggulangan korupsi di unit kerja sebaiknya:	
	a. Menekankan aspek efisiensi dan ekonomis	41,05
	b. Merupakan hasil pemikiran pejabat berupa peningkatan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan pegawai	12,63
	c. Berupa hasil kesepakatan bersama seluruh pegawai	8,42
	d. Mengikuti dan mempertahankan kebijakan yang sudah ada yang lebih tinggi	26,31
2.	Tidak tahu	11,59
	Total	100,00

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (41,05%) perlunya penerapan kebijakan penanggulangan korupsi dengan menekankan pada aspek efisiensi dan ekonomis. Sebagian kecil (8,42%) menginginkan perlunya penerapan kebijakan penanggulangan korupsi sebagai hasil kesepakatan bersama seluruh pegawai.

Data berupa harapan atau keinginan dan saran responden atas kebijakan penanggulangan korupsi di UNY yang diperoleh dari angket terbuka:

1. Perlu disusun pedoman terkait kebijakan penanggulungan korupsi, dan bentuk atau format diserahkan kepada yang lebih kompeten;
2. Memberi kepercayaan bagi SDM yang ditunjuk mengenai bidang keuangan dan sarana prasarana;
3. Ada peraturan atau rambu-rambu yang dikeluarkan UNY sebagai pedoman kerja yang baku, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya penyalahgunaan wewenang atau korupsi di unit-unit yang mengenai langsung bidang pekerjaan pengadaan, keuangan dan lain-lain;
4. Supaya diterapkan sesuai Undang-undang tindak pidana korupsi;
5. Demi keamanan dan kenyamanan bekerja kebijakan tersebut penting, namun perlu diimbangi dengan sosialisasi yang terus menerus dan berkelanjutan, sanksi yang tegas dan tidak pilih-pilih terhadap pelaku disertai dengan peningkatan kualitas kerja dan kualitas kesejahteraan;
6. Rotasi rutin pegawai 4 tahunan harus diterapkan secara konsisten;
7. Meningkatkan transparansi keuangan, pengawasan dan pembinaan;
8. Perlu monitoring rutin bagi para pemegang uang, perlu penjelasan tentang korupsi, dan

- perlu koordinasi antar pejabat dan staf;
9. Melakukan monitoring terhadap setiap jenis pengeluaran yang dilakukan oleh UNY;
 10. Dibentuk tim Satgas anti korupsi, dan memberlakukan zona bebas KKN;
 11. Menciptakan system pelayanan yang dapat mengakomodir peraturan anti korupsi;
 12. Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) selalu mengadakan cekling secara rutin paling tidak triwulanan untuk mencegah adanya korupsi di UNY;
 13. Perlu diterbitkan peraturan pencegahan korupsi di UNY sebagai pedoman bagi semua pegawai;
 14. Efektivitas implementasi kegiatan yang menggunakan aset lembaga yang bersih dari unsur korupsi di semua unit kerja, penerapan dan peneladanan bersih korupsi diawali pimpinan paling tinggi di masing-masing unit kerja; penanaman, pemahaman dan penerapan sikap mental religius yang kontinyu dengan frekuensi yang tinggi di UNY;

Data yang diperoleh dari *Focus Group Discussion* (FGD):

- Keterbatasan informasi keuangan, sehingga sulit untuk memberikan komentar;
- Pejabat paling atas seharusnya mengambil peran dalam kebijakan anti korupsi;
- Mestinya sistemnya transparan sehingga pihak lain bisa mengontrol;
- Potensi korupsi ada pada tahapan pencairan anggaran, bukan pada pengusulannya;
- Belum ada kebijakan anti korupsi yang jelas, hanya caranya saja yang muncul;
- Korupsi tidak selalu masalah uang, tetapi kegiatan yang menimbulkan perbedaan antara hari dan kegiatan yang dilakukan;
- Lebih baik jika dibuat peraturan turunan yang ada di lingkungan sendiri diluar peraturan pusat yang sudah standar;
- Penanggulangan korupsi sudah ada di UNY tetapi kurang sosialisasi dan implementasi;
- Korupsi juga bisa terjadi karena system yang kurang mendukung;
- Setiap fakultas memiliki kebijakan pelaporan penggunaan keuangan yang berbeda;
- Kebijakan penanggulangan korupsi sebaiknya dijabarkan dan dibuat oleh pemimpin tertinggi yaitu rektor.

Data dari dokumen yang berhubungan dengan kebijakan penanggulangan korupsi di UNY berupa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

B. Pembahasan

Sebagian besar responden (98,92%) merasa tahu apa itu arti korupsi, namun kriteria yang sebenarnya segala perbuatan yang tergolong korupsi mereka tidak tahu secara lengkap (90,53%) dan menganggap korupsi hanya sebatas perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bahkan korupsi diartikan secara luas tidak hanya sebatas masalah uang. (*lihat* tabel 2 dan tabel 3 serta data berupa harapan atau keinginan dan saran responden serta hasil *FGD*). Sebagian besar responden (54,74%) menganggap bahwa unit kerja tempatnya bekerja merupakan unit kerja yang tidak penting. (*lihat* tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa responden belum memahami arti sebuah unit kerja dalam system tata kelola suatu organisasi atau lembaga atau instansi seperti UNY. Anggapan responden yang demikian juga menunjukkan tingkat pemahaman yang parsial dan tidak sistemik atas sebuah unit kerja dalam suatu tata kelola kelembagaan. Pendapat yang demikian akan berdampak pada pola kerja yang dilakukan yang dapat mengakibatkan persaingan kerja yang tidak sehat dan saling menjatuhkan. Kondisi yang demikian harus diantisipasi

1. Kebijakan penanggulangan korupsi di UNY

Berdasar pada hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) tidak ada kebijakan yang khusus dikeluarkan oleh Pimpinan UNY untuk menanggulangi korupsi. (*lihat* tabel 4). Selama ini penanggulangan korupsi sebatas melaksanakan peraturan yang sudah ada dari Pemerintah yang berhubungan dengan persoalan disiplin kerja, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 berisi tuntutan bagi pegawai negeri di lingkungan instansi pemerintah seperti UNY untuk melakukan perubahan pola pikir dan perilaku serta harus memahami kondisi objektif dan perubahan lingkungan Negara dan masyarakat, serta

harus mampu menjadi perekat pesatuan bangsa, alat mewujudkan kerukunan sosial, kebersamaan, dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Demikian juga dalam melaksanakan tanggungjawabnya wajib melakukan perubahan sikap, tindakan, dan perilaku ke arah budaya kerja efisien, hemat, disiplin tinggi, dan anti korupsi, dan nepotisme (KKN), dan secara sistematis dan berkelanjutan berupaya menjadi panutan dan tauladan dalam lingkungan masyarakat.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 ini digunakan sebagai pedoman bagi pegawai negeri terutama pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja untuk acuan dalam menyusun pedoman teknis dalam upaya meningkatkan efisiensi, penghematan dan kedisiplinan kerja, dengan system pengawasan dan pengendalian yang diharuskan memperhatikan prinsip-prinsip:

- (a) Mengaktifkan sistem pengawasan internal yang lebih obyektif, transparan, dan institusional.
- (b) Partisipatif, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.
- (c) Berorientasi pembinaan dalam rangka perbaikan sistem, metode, dan perubahan tingkah-laku Aparatur Pemerintah menuju kepada sasaran yang diharapkan.
- (d) Berusaha lebih banyak menggunakan pendekatan *reward* dari pada *punishment*. Penjatuhan hukuman diberikan dalam kaitan mendidik (secara edukatif).

Disamping itu melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diharapkan dalam rangka mewujudkan pegawai negeri sipil yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Antisipasi munculnya tindak pidana korupsi di UNY mengikuti dan

mempertahankan kebijakan yang sudah ada yang berasal dari pejabat lebih tinggi, dalam hal ini segala kebijakan / peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karenanya kebijakan yang dikeluarkan pimpinan UNY selalu mendasarkan pada kebijakan dari Pemerintah terutama Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Model kebijakan penanggulangan korupsi yang diinginkan di UNY

Model kebijakan penanggulangan korupsi yang diinginkan dilakukan di UNY berdasarkan hasil penelitian di atas adalah Model Rasional. Hal ini berdasar atas kondisi riil, aspirasi dan keinginan responden yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya di unit kerja masing-masing sebagai data penelitian, dan dari data yang diperoleh ditunjukkan sebagai berikut:

- Kebijakan penanggulangan korupsi yang dikeluarkan isinya diinginkan merupakan aspirasi semua staf yang ada di unit kerja;
- Kebijakan penanggulangan korupsi yang dikeluarkan harus menekankan pada aspek efisiensi atas beban kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
- Kebijakan penanggulangan korupsi sebaiknya dibuat sebagai turunan dari kebijakan yang sudah ada yang berasal dari Pemerintah pusat.
- Kebijakan penanggulangan korupsi sebagai pedoman bagi semua pegawai untuk melaksanakan tugas masing-masing.
- Kebijakan penanggulangan korupsi sebaiknya dijabarkan dan dibuat oleh pemimpin tertinggi yaitu rektor.

Diterapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja didukung dengan adanya harapan atau keinginan segenap komunitas UNY akan adanya transparansi keuangan dan pengawasan yang baik dalam penggunaannya, serta perlu adanya pedoman teknis atau panduan kerja yang baku, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya penyalahgunaan wewenang atau korupsi di unit-unit kerja masing-masing agar ada keamanan dan kenyamanan dalam bekerja, menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan korupsi yang diinginkan di UNY adalah

kebijakan penanggulangan korupsi Model Rasional. Demikian pula dukungan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berisi kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang antara lain memuat:

- Kewajiban pegawai negeri sipil (Pasal 3):
 - (1) mengucapkan sumpah/janji PNS
 - (2) mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - (3) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - (4) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - (6) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
 - (7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - (8) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - (9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - (10) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
 - (11) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - (12) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
 - (13) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - (14) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - (15) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - (16) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
 - (17) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- Larangan pegawai negeri sipil (Pasal 4):
 - (1) menyalahgunakan wewenang;
 - (2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - (3) tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
 - (4) bekerja pada perusahaan asing, konsulta asing, lembaga swadaya masyarakat asing;
 - (5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - (6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - (7) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara

- langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- (8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - (9) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
 - (10) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - (11) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - (12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - (13) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 - (14) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - (15) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

menguatkan alasan harapan atau keinginan digunakannya Model Rasional dalam mengeluarkan kebijakan penanggulangan korupsi di UNY.

Model Rasional menekankan pada aspek efisiensi maupun ekonomis. Tuntutan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tanggung-jawabnya untuk wajib melakukan perubahan sikap, tindakan, dan perilaku ke arah budaya kerja efisien, hemat, disiplin tinggi, dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta berupaya secara sistematis dan berkelanjutan menjadi panutan dan teladan dalam lingkungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 lebih menguatkan kesimpulan bahwa model kebijakan penanggulangan korupsi yang diinginkan di UNY adalah Model Rasional.

Model rasional sebagai model kebijakan yang diinginkan untuk diterapkan di UNY dalam upaya menanggulangi korupsi merupakan kebijakan yang lebih aspiratif untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan dari kebijakan tersebut, sehingga dapat mendatangkan hasil yang memuaskan sesuai keinginan komunitas UNY.

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Rencana tahap berikutnya dilakukan penelitian untuk menemukan efektivitas penggunaan kebijakan Model Rasional dalam menanggulangi korupsi di Universitas Negeri Yogyakarta, dengan terlebih dahulu disusun kebijakan tersebut yang kemudian digunakan sebagai pedoman atau panduan bagi para pegawai di Universitas Negeri Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai unit kerja masing-masing.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan penanggulangan korupsi di UNY tidak ada secara khusus dikeluarkan. Kebijakan yang ada mengikuti dan mempertahankan kebijakan yang sudah ada yang lebih tinggi dari Pemerintah.
2. Model kebijakan penanggulangan korupsi di UNY yang diinginkan adalah Model Rasional, yaitu model kebijakan yang menekankan pada proses pengambilan keputusan secara rasional atau yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya dan lebih menekankan pada aspek efisiensi maupun ekonomis.

B. Saran

1. Perlu segera dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai UNY tentang Korupsi, agar mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi yang benar.
2. Perlu segera dikeluarkan kebijakan penanggulangan korupsi yang lebih khusus oleh pimpinan UNY sesuai model kebijakan yang tepat dan diinginkan oleh seluruh komunitas UNY serta sesuai dengan visi dan misi UNY agar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya seluruh pegawai mempunyai pedoman kerja yang jelas terhindar dari perbuatan korupsi;
3. Perlu uji coba model kebijakan penanggulangan korupsi yang tepat diberlakukan di UNY agar diperoleh efektivitas penggunaan model kebijakan tersebut untuk membawa manfaat bagi kemajuan UNY.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Julia Brannen (2005). *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alih Bahasa: H. Nuktah Arfawie Kurde, Imam Syafei, Noorhaidi A.H. Pustaka Pelajar. Samarinda.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Samodra Wibawa (1994). *Kebijakan Publik proses dan analisis*. Intermedia. Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab (1990). *Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta
- Solichin Abdul Wahab (1997). *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara*. BumiAksara. Jakarta.
- Suharsimi Arikunto (1992). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat: Karangmalang, Yogyakarta. 55281.
Telp. (0274) 550839 Fax, (0274) 518617. e-mail: lppm.uny@gmail.com

SURAT PERJANJIAN INTERNAL
PELAKSANAAN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 014/AUPT-BOPTN/UN34.21/2013

Pada hari ini selasa tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Anik Ghufon. : Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut; selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ANANG PRIYANTO, M.Hum. : Ketua Tim Peneliti dari Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, yang beralamat di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Internal ini berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 975/A3/3/KU/2011, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 09/DIKTI/Kep/2011, tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penugasan di Lingkungan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2013. DIPA Universitas Negeri Yogyakarta No. : DIPA-023.04.2.189946/2013 tanggal 5 Desember 2012. Revisi ke-3 No.: DIPA-023.04.2.189946/2013 tanggal 6 Mei 2013.
10. Surat Keputusan Rektor UNY Nomor : 266a Tahun 2013, tanggal 1 Mei 2013 tentang penetapan pemenang dan judul penelitian desentralisasi Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul dan nama Ketua/Anggota Peneliti sebagai berikut :

Judul : MODEL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KORUPSI DI UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA
Ketua Peneliti : ANANG PRIYANTO, M.Hum.
Anggota : 1. MARIA LIES ENDARWATI, M.Si
2. Dr. SAMSURI, M.Ag
3.

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Yogyakarta No. : DIPA-023.04.2.189946/2013 tanggal 5 Desember 2012. Revisi ke-3 No.: DIPA-023.04.2.189946/2013 tanggal 6 Mei 2013.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban menggunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan penelitian sebagaimana pasal 1 sampai selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara.

Pasal 3

Pembayaran dana Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi ini akan dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tahap Pertama 70% sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Tahap Kedua 20% sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy sebanyak 6 (enam) eksemplar disertai softcopy (CD dalam format "pdf") paling lambat tanggal 20 Nopember 2013.
- (3) Tahap Ketiga 10% sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Hasil Kinerja Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hard copy sebanyak 3 (tiga) disertai Sofcopy (CD dalam bentuk format "PDF")
- (4) PIHAK KEDUA wajib membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Laporan Penggunaan Keuangan sejumlah termin I sebesar 70%, dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy masing-masing 2 (dua) eksemplar paling lambat tanggal 13 September 2013.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- (1) Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta;
- (2) Mendaftarkan hasil penelitiannya untuk memperoleh HKI;
- (3) Memanfaatkan hasil penelitian untuk proses bahan mengajar;
- (4) Mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal yang terakreditasi.
- (5) Membayar PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku
- (6) Mengikuti Seminar dari Awal sampai dengan selesai

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian yang dimaksud Pasal 1 ini selama 6 (enam) bulan terhitung mulai 27 Mei 2013 sampai dengan 27 Nopember 2013, dan PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya **20 Nopember 2013**.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - a. Laporan Akhir Hasil Penelitian dalam bentuk hardcopy sebanyak 6 (enam) eksemplar, dan dalam bentuk soft copy (CD dalam format **""*.pdf""**) sebanyak 1 (satu) keping.
 - b. Artikel Ilmiah untuk dimasukkan ke Jurnal di melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY, yang terpisah dari laporan sebanyak 2 (dua) eksemplar
- (3) Laporan hasil penelitian dalam bentuk hard copy harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
 - b. Warna cover MERAH
 - c. Di bagian bawah kulit ditulis :
Dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri Yogyakarta dengan Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2013 Nomor: 532a/BOPTN/UN34.21/2013 Tanggal 27 Mei 2013
- (4) Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan ke :
 - a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - b. PDII LIPI Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - c. BAPPENAS c.q. Biro APKO Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - d. Perpustakaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY sebanyak 3 (tiga) eks.
- (5) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persimil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Apabila ketua peneliti sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.

- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Hasil penelitian berupa peralatan dan / atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 9

Surat Perjanjian Internal Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,


ANANG PRIYANTO, M.Hum.
NIP. 195809101985031003

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM
Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Anik Ghufon
NIP. 19621111 198803 1 001

Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian Tugas

No.	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Anang Priyanto, M.Hum 0010095815	UNY	Hukum	10	Merencanakan dan mengatur langkah-langkah penelitian di lapangan
2	M. Lies Endarwati, M.Si. 0011076105	UNY	Manajemen	8	Mengatur dan mengamati pelaksanaan FGD
3	Dr. Samsuri, M.Ag 0019067206	UNY	PKn / Politik	8	Mengumpulkan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Karangmalang, Yogyakarta. 55281.
Telp. (0274) 550839 Fax (0274) 518617. e-mail: lppm.uny@gmail.com

FRM/LEMLIT-PROG/09-02
04 NOV. 2008

BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DANA BOPTN

1. Nama Peneliti : ANANG PRIYANTA, M. HUM
2. Jurusan/Prodi : PKnH
3. Fakultas : FIS
4. Skim Penelitian : AUP.T
5. Judul Penelitian : MODEL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KORUPSI DI UNT
6. Pelaksanaan : Tanggal 14 Nopember 2012 J a m 07.30 - 14.00
7. Tempat : Ruang Sidang LPPM - UNY
8. Dipimpin oleh : Ketua
Sekretaris
9. Peserta yang hadir : a. Konsultan : orang
b. Nara sumber : orang
c. BPP : orang
d. Peserta lain : orang
Jumlah : orang

SARAN - SARAN

- Lengkapi model yang paling tepat ??
- Hasil penelitian diperjelas
- Penjelasan tabel.

10. Hasil Seminar;

Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika dan tata tulis, seminar berkesimpulan bahwa hasil penelitian tersebut di atas :

- a. Diterima, tanpa revisi/pembenahan hasil Penelitian
- b. Diterima, dengan revisi/pembenahan
- c. Dibenahi untuk diseminarkan ulang

Ketua Sidang



DR. MUKMINAN

NIP: 1953.09.06.197803 1001

Mengetahui
Badan Pertimbangan
Penelitian



DR. IMAN

NIP: 1979.10.15.2003 121001

Sekretaris
Sidang



DRENI HENDRASUOMO

NIP: 19820117 200609 1002

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL PENELITIAN

Jenis Seminar : Hasil Penelitian
 Hari, Tanggal : Kamis, 14 Nopember 2013
 Pukul : 07.30 - Selesai
 Tempat : Ruang Sidang LPPM
 Kelompok :

No.	N A M A	GELAR	TANDA TANGAN	
1	SAHID	M.Sc.	1.	2.
2	RR LIS PERMANA SARI	Dra. M.Si.	3.	4.
3	JASLIN IKHSAN	Ph.D.	5.	6.
4	EVY YULIANTI S.	S.Si.,M.Sc.	7.	8.
5	ATMINI DHORURI		9.	10.
6	KUSWARI HERNAWATI S	S.Si, M.Kom	11.	12.
7	RAHAYU DWI S R	M.Pd.	13.	14.
8	ELLY ARLIANI	M.Si.	15.	16.
9	HARI SUTRISNO	Dr. M.Si.	17.	18.
10	NUR KADARISMAN	Drs. M.Si.	19.	20.
11	SABAR NUROHMAN	S.Pd.Si.,M.Pd.	21.	22.
12	EDI ISTIYONO	Drs. M.si.	23.	24.
13	Das Salirawati	Dr	25.	26.
14	MOHAMMAD ADAM	MT.	27.	28.
15	MOHAMMAD ALI		29.	30.
16	NUCHRON	Dr. M.Pd	31.	32.
17	ICHDA CHAYATI		33.	34.
18	YURIANI	M.Pd.	35.	36.
19	DJOKO LARAS BUDYO TARUNO	M.Pd.	37.	38.
20	WIDARTO	Dr. M.Pd.	39.	40.
21	GIRI WIYONO	MT		
22	SAMSUL HADI			
23	FITRI RAHMAWATI	Dr. M.Pd.		
24	THOMAS SUKARDI			
25	HARYANTO			
26	Sri Atun	Prof. Dr		
27	GRENDI HENDRASTOMO	M.A.		
28	ARGO PAMBUDI			
29	SUHADI PURWANTARA	M.Si.		
30	AGUNG UTAMA	SE., M.Si		
31	AULA AHMAD HAFIDH	M.Si		
32	AMAN	Dr		
33	Putu Sudiro	Dr		
34	Siti Hamidah	Dr		
35				
36				
37				
38				
39				
40				

Yogyakarta, 14 Nopember 2013
 Ketua Sidang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat: Jl. Colombo 1, Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500;

Laman: <http://www.uny.ac.id>, e-mail: humas@uny.ac.id

Nomor : 472/UN34/TU/2013

1 Nopember 2013

Lamp. :

Hal : Pengumpulan Data Penelitian


Yth. Bapak/Ibu
Kepala Bagian dan Kepala Subbagian
Universitas Negeri Yogyakarta

Sehubungan dengan keperluan pengumpulan data penelitian dengan judul : Model Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Universitas Negeri Yogyakarta” oleh Bapak Anang Priyanto, S.H., M.Hum beserta Tim, dimohon Bapak/Ibu Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dapat membantu dalam pengisian quesioner/angket penelitian (*terlampir*).

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Umum
Perencanaan dan Keuangan


Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd.

NIP 19660314 198603 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
UNIT LAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting Psw 420, Fax (0274) 565500;
Laman : lkbh@uny.ac.id E-mail : lkbh@uny.ac.id

Yogyakarta, 4 Nopember 2013

Kepada yth;
Bapak/Ibu
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
Pada unit-unit di UNY

Dengan hormat;

Dalam rangka menghimpun data penelitian dengan judul "Model Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Universitas Negeri Yogyakarta", maka kami selaku tim peneliti memohon kepada Bapak/Ibu Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada unit-unit yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta untuk sudi kiranya meluangkan waktu sejenak guna mengisi angket penelitian kami tersebut (*terlampir*) sesuai kondisi yang sebenarnya Bapak/Ibu hadapi setiap hari. Dengan harapan semoga data yang Bapak/Ibu berikan membawa hasil yang memuaskan dan ditindak lanjuti menjadi sebuah kebijakan yang antisipatif terhadap korupsi serta tepat guna di UNY. Atas terkabulnya permohonan kami dan bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami;
Ketua Peneliti;



Anang Priyanto
NIP. 19580910 198503 1 003

ANGKET PENELITIAN

“MODEL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KORUPSI DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA”

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :/.....

Jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang (☒) di depan jawaban yang tersedia dan isikan jawaban atas pertanyaan yang ada pada tempat yang tersedia:

1. Apakah di unit kerja Bapak/Ibu/Anda merupakan unit kerja yang sangat penting untuk jalannya kegiatan universitas/lembaga/fakultas yang berhubungan dengan persoalan korupsi?
☐ Ya.
☐ Tidak
☐ Tidak tahu
2. Apakah Bapak/Ibu/Anda mengetahui kriteria perbuatan korupsi itu?
☐ tahu.
☐ tidak tahu.
3. Manakah uraian berikut ini yang dapat digolongkan sebagai perbuatan korupsi sepengetahuan Bapak/Ibu Anda?
☐ memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
☐ pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
☐ memberi sesuatu kepada pegawai negeri karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
☐ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
☐ menerima uang sebagai pembayaran jasa dari Negara karena pekerjaan dan kewenangannya yang memberi keuntungan pada diri pribadi.

- ☐ Tidak tahu.
- 4. Apakah di unit kerja Bapak/Ibu/Anda ada kebijakan penanggulangan korupsi dalam bentuk peraturan atau keputusan atau surat edaran?
 - ☐ Ada
 - ☐ Tidak Ada
 - ☐ Tidak tahu.
- 5. Jika ada kebijakan penanggulangan korupsi di unit kerja Bapak/Ibu/Anda, kebijakan tersebut dalam bentuk apa?
 - ☐ Peraturan
 - ☐ Surat Keputusan
 - ☐ Surat Edaran
 - ☐ Tidak tahu.
 - ☐ Lainnya
- 6. Kebijakan yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 dikeluarkan oleh siapa?
 - ☐ Rektor
 - ☐ Dekan
 - ☐ Ketua Lembaga / Badan
 - ☐ Direktorat
 - ☐ Ketua Jurusan
 - ☐ Kepala Biro
 - ☐ Kepala Bagian
 - ☐ Tidak tahu.
 - ☐ Lainnya:.....
- 7. Jika Bapak/Ibu/Anda menjawab nomor 4 “Tidak ada”, bagaimana unit kerja anda melakukan antisipasi korupsi pada pimpinan dan staf?
 - ☐ memberi kepercayaan kepada individu (staff) masing-masing.
 - ☐ tidak ada perhatian atasan atas tindakan korupsi yang dapat terjadi.
 - ☐ membebaskan kepada staff untuk dapat menentukan sikap masing-masing.
 - ☐ tidak tahu.
 - ☐ Lainnya:.....
- 8. Alasan mengapa di unit kerja Bapak/Ibu/Anda tidak ada kebijakan penanggulangan korupsi:
 - ☐ Atasan/pimpinan tidak berminat untuk membuat kebijakan penanggulangan korupsi.
 - ☐ Atasan/pimpinan tidak tahu bagaimana membuat kebijakan penanggulangan korupsi.

- ☐ Atasan/pimpinan banyak disibukkan oleh pekerjaannya.
- ☐ Tidak tahu.
- ☐ Lainnya:.....

9. Kebijakan penanggulangan korupsi yang ada di unit kerja Bapak/Ibu/Anda isinya berupa:

- ☐ inisiatif pimpinan/atasan langsung.
- ☐ aspirasi kelompok-kelompok bagian tertentu dari unit kerja yang ada.
- ☐ aspirasi semua staff yang ada di unit kerja Bapak/Ibu/Anda;
- ☐ aspek efesiensi atas beban kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
- ☐ kebijakan yang sudah ada dengan tidak melakukan perubahan penyesuaian dengan kondisi unit kerja bapak/ib/anda.
- ☐ tidak tahu.
- ☐ Lainnya:.....

10. Jika diterapkan kebijakan penanggulangan korupsi pada unit kerja Bapak/Ibu/Anda sebaiknya menurut Bapak/Ibu/Anda kebijakan tersebut:

- ☐ menekankan pada aspek efisiensi dan ekonomis, baik pada persoalan sumber daya manusia maupun terhadap sarana prasarana di unit kerja.
- ☐ merupakan hasil pemikiran/gagasan pejabat/atasan yang berupa peningkatan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan pegawai/staff di unit kerja masing-masing.
- ☐ berupa hasil kesepakatan bersama seluruh pegawai/staff di unit kerja masing-masing sesuai bidang unit kerjanya.
- ☐ mengikuti dan mempertahankan kebijakan yang sudah ada dari unit kerja yang lebih tinggi/lembaga/Kementerian.
- ☐ tidak tahu.

Saran Bapak/Ibu/Anda terhadap kebijakan penanggulangan korupsi di UNY?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Anang Priyanto, M.Hum
NIP/NIK : 19580910 198503 1 003
Tempat dan Tanggal Lahir : Cilacap, 10 September 1958
Jenis Kelamin : ☐ **Laki-laki** ☐ **Perempuan**
Status Perkawinan : ☐ **Kawin** ☐ **Belum Kawin** ☐ **Duda/Janda**
Agama : Islam
Golongan/Pangkat : IV a / Pembina
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat : Karangmalang Sleman
Telp./Faks. : (0274)586168 psw 384
Alamat Rumah : Jl. Plosokuning Raya No.94A Minomartani Sleman
Telp./Faks. : (0274)882637
Alamat e-mail : anang_priyanto@uny.ac.id ;ngyanto@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1983	S1	Universitas Gadjah Mada	Ilmu Hukum
2001	S2	Universitas Diponegoro	Ilmu Hukum

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2004	<i>Conflict Transformation, Human Right, and Democracy Training</i> , in South Africa, Nopember 2004 (Peserta)	Flowshare University USA & DitJen HAM Dep Hukum dan HAM RI
2005	Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas di Batam (peserta)	Dit Jen Dikti Dep Dik Nas RI
2006	Pelatihan Kompetensi Dosen Bidang Ilmu Hukum di Laboratorium Forensik POLRI Jakarta (Peserta)	Jurusan PKn dan Hukum FISE- UNY dan Lab Forensik POLRI
2007	Training of Trainer Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI tgl. 23 s/d 26 Agustus 2007	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI
2008	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan tanggal 9 s/d 11 April 2008 (13 jam) Cisarua, Bogor	Biro Hukum Dep. Dik. Nas. RI
2008	Internal Audit Quality Management System ISO 9001:2000 Training, tgl 21 - 22 Agustus 2008, Yogyakarta (Peserta)	Point Development International -

		UNY
--	--	-----

PENGALAMAN JABATAN

Jabatan	Institusi	Tahun....s/d
Sekretaris	Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial	1990 – 1993
Sekretaris	Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial	1993 – 1996
Anggota	Tim Pengembang dan Penyusun Standar Kompetensi mata pelajaran PKn SD, SMP, dan SMA. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional RI	1997 - 1998
Instruktur	Training of Trainer (TOT) Terintegrasi Guru Mata Pelajaran PKn SMP se Indonesia, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (SMP) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI	1999 - 2006
Sekretaris	Jurusan PKn dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi	2004 – 2007
Ketua	Jurusan PKn dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi	2007 s/d sekarang
Ketua	Program Studi PKn, Jurusan PKn dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi	2007 s/d sekarang
Sekretaris	Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) UNY	1999 s/d 2000
Ketua	Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) UNY	2000 s/d 2011
Ketua	UPT Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum UNY	2011 s/d sekarang
Anggota	Tim Ad Hoc Kantor Penjaminan Mutu UNY	2007 s/d 2011

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2006	Kebijakan Judikatif Dalam Mengantisipasi Penyelewengan Tugas Hakim	Ketua	DIPA UNY
2007	Tinjauan Hukum Tentang Permasalahan-permasalahan Administrasi Kependudukan Pasca Gempa di desa Gilangharjo Pandak Bantul	Anggota	DIPA UNY
2007	Kebijakan Pengaturan Divestasi Penanaman Modal Asing di Sektor Pertambangan	Ketua	DIPA UNY
2009	Identifikasi Kesalahan Dalam Penyusunan Peraturan (<i>legal drafting</i>) di Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2004 – 2008	Anggota	DIPA UNY
2009	Nilai Pendidikan Karakter Dalam Serat Wulang Reh	Anggota	DIPA UNY
2009	Optimalisasi Perkuliahan Metodologi	Ketua	DIPA UNY

	Penelitian Mahasiswa PKn Angkatan 2006 Melalui Pendekatan Konstruktivis		
2010	Pendapat Mahasiswa FIS UNY tentang Etika Pergaulan Mahasiswa di Kampus	Ketua	DIPA UNY
2011	Filosofi dan Politik Hak Asasi Manusia di Tiga Dunia: Studi Komparatif Terhadap Deklarasi Universal, Deklarasi Negara Islam, dan Deklarasi Afria mengenai HAM	Ketua	DIPA UNY
2012	Profil Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul Dalam Perspektif Gender	Ketua	DIPA UNY

KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2002	Model 3 Pedoman Khusus Pola Induk Pengembangan Silabus Berbasis Kemampuan Dasar Sekolah Menengah Umum (SMU)	Direktorat Pendidikan Menengah Umum Dit.Jen.Dik.Das.Men. Dep.Dik.Nas. RI
2003	Sistem Politik Demokrasi (Modul Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi Guru Mata Pelajaran PPKn SLTP)	Proyek Peningkatan Mutu SLTP Jakarta Tahun 2003
2005	Pendidikan Kewarganegaaan SMP Kelas 1, Kelas 2 dan Kelas 3	PT Mediatama Surakarta
2005	Pendidikan Kewarganegaaan SMA Kelas 1 dan Kelas 2	PT Mediatama Surakarta
2006	Hukum Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981	FISE – UNY dan UNY Press
2007	Kriminologi dan Kenakalan Remaja	Universitas Terbuka Jakarta
2008	Perundang-undangan Nasional (Bahan Ajar PLPG Guru SMP Rayon 11)	P3AI – UNY
2012	Hukum Acara Pidana Indonesia	Penerbit Ombak Yogyakarta
2012	Kriminologi	Penerbit Ombak Yogyakarta

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2006	Hukum dan Berbagai Kajiannya	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Jawa Tengah
2006	Penilaian Dalam Pembelajaran Ilmu Hukum	Jurusan PKn dan Hukum FISE – UNY
2009	Komentar Terhadap Undang-Undang BHP dan Kesiapan UNY Menjadi BHP	Badan Eksekutif Mahasiswa FIP-UNY

2012	Beberapa Catatan yang Perlu Diperhatikan Isi Undang-undang Pendidikan Tinggi sebagai Pijakan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	Humas UNY
2012	Menyusun Surat Keputusan	Fakultas Ilmu Pendidikan UNY
2012	Peraturan Kedinasan	Bagian Kepegawaian UNY
2013	Pentingnya Legal Drafting Bagi Instansi Pemerintah	Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penjaminan Mutu dan Kerjasama Universitas Jenderal Soedirman

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
2005	Temu Konsultasi Diseminasi Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan dengan Tema: Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dalam Situasi Darurat di Hotel Sahid Kusuma Surakarta tgl. 27 s/d 29 Juli 2005	Biro Hukum dan Organisasi Sekkretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional RI
2006	Semiloka Pengembangan Instrumen Evaluasi dan Perkuliahan Praktek tgl. 4 Mei 2006	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) UNY
2006	Lokakarya Pertukaran Dosen dan Penyusunan Silabi Program Kemitraan HISPISI (UNY, UNESA, UNNES, UNS, UM) tgl. 2 – 3 September 2006 di Hotel Grand Setia Kawan Surakarta	HISPISI
2007	Seminar Badan Hukum Pendidikan: Neo-Liberalisme Pendidikan	HMI-UGM Yogyakarta
2007	Workshop Penyerapan Aspirasi Perguruan Tinggi untuk RUU tentang Kementrian Negara dari DPR RI, 15 Februari 2007.	Kerjasama Pansus RUU Kementerian Negara DPR RI dengan UGM Yogyakarta
2007	Seminar Nasional "Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum dan Sistem Perundang-undangan Indonesia" tgl. 30 – 31 Mei 2007	KAGAMA UGM Fakultas Hukum
2007	Workshop Pemberdayaan Alumni Pelatihan HAM Luar Negeri Tahap II, Nopember 2007 di Jakarta	Dit.Jen Perlindungan HAM Dep.Huk.Ham RI
2007	Lokakarya Penyusunan Panduan Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Yogyakarta tgl. 14 Desember 2007 di Ruang Sidang Umum	Universitas Negeri Yogyakarta

	Gedung Rektorat UNY	
2008	Seminar Nasional "Restrukturisasi Pendidikan Karakter" tg 29 Juli 2008 di Ruang Sidang Utama Rektorat UNY	Universitas Negeri Yogyakarta
2008	Seminar Nasional "Membedah Kembali Nilai-nilai Kemerdekaan" tanggal 27 Agustus 2008 di Ruang Sidang Utama Rektorat UNY	FISE UNY Yogyakarta
2009	Seminar Status dan Kondisi Penegakan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Indonesia, Hotel Shantika Yogyakarta, tgl. 14 Maret 2009	Pusham-Ull Yogyakarta dan Norwegian Centre for Human Rights
2009	Seminar "Practitioner Research in Management Development"	Kerjasama FISE – UNY dengan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia DIY
2011	Seminar Nasional 1 Abad Sjafrudin Prawiranegara "Menang dalam Kalah, Kalah dalam Menang" (Pengembalian Mandat PDRI kepada Soekarno-Hatta)	Universitas Islam Indonesia (UIN) Yogyakarta
2011	Seminar Nasional Pendidikan Karakter	FIS UNESA dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia (HHISPISI)
2011	An Internasional Workshoop on Constitutional Reform and Its Influence on Civic Education	Fakultas Hukum UIN Yogyakarta dan <i>Hannas Seidel Foundation</i> Indonesia

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Kegiatan
2006	Sosialisasi Undang-Undang Guru dan Dosen (UU No.14 Th.2005) Dalam In House Training Bagi Guru-guru SMP Negeri 1 Kalasan Sleman DIY tgl. 14 Maret 2006 (penyaji)
2008	Sosialisasi Sertifikasi Guru Swasta se Kabupaten Sleman di Sekolah Fajar Nugroho tg. 8 Mei 2008 (penyaji)
2008	Penilaian Bahan Ajar Kontektual PKn SMP/MTs yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMP Dit.Jen.Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Dep.Dik. Nas. RI tgl. 31 Januari s/d 2 Februari 2008 di Hotel Ros In Yogyakarta. (penilai)
2009	Pemakalah dalam Seminar Uji Konstitusi UU BHP yang diselenggarakan BEM FIP-UNY tanggal 28 Maret 2009
2009	Nara Sumber Diskusi tentang Hukum Bagi Mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) dan Pendidikan Dasar (Dikdas) Konsentrasi IPS, tgl. 12 Mei 2009 di Program Pasca Sarjana UNY

2009	Nara Sumber Diskusi tentang Hukum Bagi Mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) dan Pendidikan Dasar (Dikdas) Konsentrasi IPS, tgl. 12 Mei 2009 di Program Pasca Sarjana UNY
2010	Pengabdian Masyarakat "Sosialisasi dan Pelatihan Hukum KDRT pada Masyarakat Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman" (nara sumber)
2010	Pengabdian Masyarakat "Sosialisasi dan Pelatihan Hukum KDRT pada Masyarakat Dusun Seturan Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman" (nara sumber)
2012	Pelatihan Manajemen dan Training ESQ Pejabat di lingkungan UNY Tahun 2012" tg 13 – 16 Februari 2012 di ruang sidang utama Rektorat UNY (pelatih)
2012	Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru-guru SLB "Fajar Nugroho" Condongcatur Sleman tgl 29 September 2012

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Organisasi	Jabatan
2006 s/d 2008	Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNY	Seksi Advokasi
2012 s/d sekarang	Masyarakat Peneliti Pendidikan Indonesia (MPPI)	Ketua Seksi Pengembangan Kelembagaan

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Yogyakarta, 7 Maret 2013

(Anang Priyanto, S.H., M.Hum)

B. Anggota Peneliti I

a. Nama lengkap : M. Lies Endarwati, M.Si
 b. Tempat/Tgl Lahir : Ngawi, 11 Juli 1961
 c. Jenis Kelamin : Perempuan
 d. Pangkat/Gol, NIP : Penata, III/c, 19610711 198812 2 001
 e. Jabatan Fungsional : Lektor
 f. Fakultas/Jurusan : FE/Manajemen
 g. Alamat Kantor : FE UNY, Karangmalang Yogyakarta 55281
 h. Telpn/Faks : (0274) 586168, psw: 375, 381/ 0274 - 548202
 i. Alamat Rumah : Jl. Pura 192 Sorowajan, Yogyakarta
 j. Telpn/HP : (0274) 489464/0811267000
 k. E-mail : lies_endarwati@yahoo.com
 l. Mata Kuliah yang diampu : Kewirausahaan; Komunikasi Interpersonal
 Komunikasi Pemasaran; Pemasaran Strategik; Psikologi
 Industri.

1. Pendidikan

No.	Program	S-1	S-2
1	Nama PT	Universitas Brawijaya	Universitas Gadjah Mada
2	Bidang Ilmu	Manajemen	Manajemen

2. Pengalaman Penelitian

No.	Judul Penelitian	Tahun	Sumber Dana
1	Implementasi Metode Pemecahan Masalah dan Diskusi Sebagai Upaya Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan	2002	DIKS
2	Analisis <i>Empowerment</i> dan Kebutuhan untuk Berprestasi Anggota Partai Politik terhadap <i>Organizational Citizenship Behavior</i>	2005	Dikti
3	<i>Placement</i> Karyawan di Universitas Negeri Yogyakarta	2008	DIPA UNY
4	Kemiskinan dan Pengembangan Model Kredit Mikro bagi Perempuan Miskin di DIY	2009	DIPA UNY
5	Kepuasan Nasabah Bank BPD DIY	2012	BPD DIY
6	Profil Kesehatan Masyarakat Gunung Kidul dalam Perspektif Gender	2012	DIPA UNY

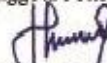
3. Daftar Publikasi Yang Relevan Dengan Penelitian

No.	Judul Tulisan	Tahun	Jurnal
1	Kompetisi Inti Sebagai Keunggulan Strategi Bersaing	2002	Jurnal Pendidikan dan Akuntansi
2	Implementasi Metode Pemecahan Masalah dan Diskusi Sebagai Upaya Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan	2003	Jurnal Pendidikan dan Akuntansi
3	EQMAP Aktivis Perempuan Politik di DIY	2005	Jurnal Ilmu Manajemen

Semua data yang saya isikan dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika di kemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya.

Yogyakarta, 20 Maret 2013

Anggota Peneliti,



M Lies Endarwati, M.Si

NIP. 19610711 198812 2 001

BIODATA ANGGOTA TIM PENELITIAN

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Samsuri, M.Ag.
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	NIP	197206192002121001
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Haurgeulis, 19 Juni 1972
5	Alamat Rumah	Perum. Sambiroto Asri A-03, Purwomartani, Kalasan, Sleman 55571
6	Nomor Telepon/Faks.	-
7	Nomor HP	081805950338
8	Alamat Kantor	Jurusan PKn dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281
9	Nomor Telepon/Faks	0274-586168 ext. 595/0274-548201
10	Alamat e-mail	samsuri@uny.ac.id
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 5 orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pendidikan Kewarganegaraan 2. Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan 3. Dasar-dasar Pendidikan Moral 4. Pendidikan Karakter 5. Moral Agama

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S-1	S-2	S-3
Nama PT	IKIP Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
Bidang Ilmu	Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan	Studi Islam Konsentrasi Pendidikan Islam	Pendidikan IPS Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan
Tahun Masuk-Lulus	1991-1997	1998-2000	2006-2010
Judul Tugas Akhir	Studi Penyelesaian Perang Sipil di Bosnia-Herzegovina (1992-1996)	Perjuangan Masyumi	Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan

			Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi).
Nama Pembimbing/ Promotor	1.Drs. Ekram Pawiroputro, M.Pd. 2.Drs. Mudjono	Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A.	1. Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H. 2. Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A. 3. Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si.

C. PENGALAMAN PENELITIAN

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2009	Transformasi Masyarakat Kewargaan (<i>Civil Society</i>) dalam Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Politik Pendidikan dalam Pembentukan Masyarakat Demokratis)	Hibah Penelitian Mahasiswa Program Doktor SPs UPI Bandung	42,55
2.	2009	Pembaharuan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Politik Pendidikan di Indonesia Pasca-1998	DIPA FISE UNY	5
3.	2006	Penanaman Nilai Moral Model Manajemen Qolbu	DIPA FISE UNY	2,5

D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2011	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MENULIS ARTIKEL ILMIAH BERBASIS PENELITIAN DI JURNAL UNTUK GURU PKN SMP/MTs SE-KABUPATEN BANTUL	DIPA FISE UNY	5

E. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
1.	2011	Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan era reformasi di Indonesia	XXX/2	Cakrawala Pendidikan
2.	2010	Transforming Islamic Values Into Civic Education (A Preliminary Study in the Islamic	IX/2	MILLAH

		Higher Education Institutions in Indonesia)		
3.	2009	Objektivikasi Pancasila sebagai Modal Sosial Warga Negara Demokratis dalam Pendidikan Kewarganegaraan	2/2	ACTA CIVICUS
4.	2007	<i>Civic Education</i> Berbasis Pendidikan Moral di Cina	1/1	ACTA CIVICUS
5	2006	Kajian Tematis Keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan	V/2	MILLAH

F. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2012	Pendidikan Karakter Warga Negara		Pustaka Hanif Surakarta
2	2010	Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan		FISE UNY
3.	2008	Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan		FISE UNY

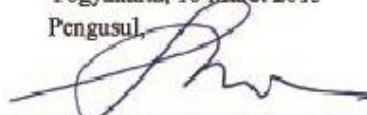
G. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

No.	Tahun	Judul/Tema HKI	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi.

Yogyakarta, 18 Maret 2013

Pengusul,



(Dr. Samsuri, M.Ag.)

NIP. 19720619 200212 1 001

